

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini akan menyajikan bahasan yang berkaitan dengan hasil penelitian, sehingga uraian pada pembahasan ini peneliti mengintegrasikan hasil penelitian dengan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya akan diidentifikasi sebagaimana tujuan penelitian. Adapun hasil temuandengan mengaitkan teori-teori akan dibahas dalam poin berikut:

A. Penerapan SAIBA

1) Kesesuaian Penerapan Aplikasi SAIBA dengan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri

Aplikasi SAIBA merupakan terobosan aplikasi akuntansi basis akrual yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan Divisi Sistem Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan. Dalam penerapannya aplikasi SAIBA ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwasanya Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya

disingkat dengan SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Adapun komponen dalam laporan keuangan yang termaktub dalam lampiran I.01 Kerangka Konseptual paragraph 28, bahwa laporan keuangan pada lembaga/instansi terbagi atas:¹

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional (LO)
- e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- f) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Demikian dalam unsur laporan keuangan pada paragraf 60 disebutkan bahwa laporan keuangan pada lembaga/instansi pemerintah terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terbagi atas LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. Sedangkan CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

¹ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penerapan SAIBA dalam penyusunan laporan keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tidak adanya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas dikarenakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri merupakan salah satu instansi bukan Badan Layanan Umum (Non BLU) yang tidak memiliki pendapatan dan kas, hanya mengajukan belanja kepada KPPN dengan mengeluarkan SPM sehingga saldo akhir nihil. Sedangkan untuk Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun sendiri menggunakan aplikasi CaLK, namun semua aplikasi tersebut adalah aplikasi yang terintegrasi.

Disamping itu Komisi Pemilihan Umum memiliki kebijakan akuntansi sendiri yakni sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dalam Bab IV tentang pelaporan bagian Pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga (LKKL) disebutkan dalam poin-poin berikut ini bahwa:

- a. Laporan Keuangan disusun menggunakan aplikasi SAIBA atau aplikasi lain yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
- b. Satker menyampaikan laporan keuangan ke KPPN dan UAPPA-W/UAPA meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan

Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca disertai dengan Catatan Laporan Keuangan”.²

Merujuk pada penjelasan di atas, maka penerapan SAIBA dalam penyusunan laporan keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tidak adanya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas dikarenakan Komisi Pemilihan Umum merupakan instansi bukan Badan Layanan Umum (Non BLU) yang tidak memiliki pendapatan dan kas, hanya mengajukan belanja kepada KPPN dengan mengeluarkan SPM sehingga saldo akhir nihil. Sedangkan untuk Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun sendiri menggunakan aplikasi CaLK, namun semua aplikasi tersebut adalah aplikasi yang terintegrasi.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian terdahulu lainnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arieffin Dian Permana, dengan judul “Penerapan Aplikasi SAIBA untuk Penyusunan Laporan Keuangan”. Penelitian yang dilakukan Arieffin Dian Permana dan peneliti menyajikan proses penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang dimulai dari perekaman dokumen baik secara manual maupun terkomputerisasi dan akan membentuk jurnal transaksi, selanjutnya jurnal

² Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 124 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, hal. 91.

tersebut dilakukan posting ke buku besar dan diikhtisarkan dalam laporan keuangan.³

B. Efektivitas Penerapan SAIBA di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.

Ciri utama SAIBA adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan data untuk pelaporan keuangan. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam menganalisis efektivitas suatu sistem yang dilihat dari segi kuantitas, kualitas, ketepatan waktu.

1. Kuantitas Penerapan SAIBA

Diukur dari banyaknya atau jumlahnya analisis efektivitas SAIBA di lihat dari segi kuantitas terdiri dari hasil keluaran yang dihasilkan oleh SAIBA yaitu berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Adapun penjelasan dari masing-masing laporan keuangan SAIBA yaitu sebagai berikut:

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan

³ Arieffin Dian Permana, "Penerapan Aplikasi SAIBA Untuk Penyusunan Laporan Keuangan", *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*-Vol. 14 Juni 2016, hal. 67.

realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Ada tiga jenis sumber anggaran yakni pendapatan Negara dan hibah, belanja dan pembiayaan. Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, APBN hanya digunakan untuk jenis belanja saja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

b) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset yang disajikan dalam neraca berupa aset lancar seperti persediaan yang berasal dari aplikasi persediaan, aset tetap yang berasal dari hasil transfer aplikasi SIMAK-BMN, kewajiban yang berasal dari utang kepada pihak ketiga dan ekuitas yang berasal dari nilai akhir laporan perubahan ekuitas.

c) Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas seperti pendapatan operasional, beban operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Namun, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri yang ada hanya beban operasional karena anggaran yang digunakan adalah untuk belanja. Laporan yang dihasilkan adalah perbandingan dari jumlah laporan tahun pelaporan dan tahun sebelumnya.

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ekuitas menjelaskan ekuitas awal, surplus atau defisit LO, dan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas.

2) Ketepatan Waktu

Penerapan SAIBA menyebabkan informasi yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri menjadi lebih baik, salah satunya dari segi ketepatan waktu. Analisis efektivitas di lihat dari segi ketepatan waktu dapat dibuktikan dari hasil wawancara dimana setelah diterapkannya SAIBA, setiap staf yang bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan termotivasi untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan mereka merasakan sekali dengan adanya program ini sangat terbantu menyelesaikan tugas, dan penyajian laporan keuangan tidak pernah terlambat.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh I Gede Pradnya Purnama, I Gusti Ayu Purnamawati dan Nyoman Putra Yasa, dengan judul “Evaluasi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol Kabupaten Buleleng”. Dalam penelitian tersebut menyatakan

bahwa penerpan SAP berbasis akrual di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol sudah efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi anggaran yang sudah sesuai dengan target anggaran, yang rata-rata sudah hampir mencapai 100%.⁴

C. Kualitas Laporan Keuangan dengan Penerapan SAIBA

Salah satu syarat kualitas laporan keuangan yaitu diakuntansikan dengan benar. Setiap unsur-unsur laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan harus di akuntansikan dengan benar.

Dilaporkan secara lengkap dimana laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding dan tidak menyesatkan pembaca. Diaudit secara Independent. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang sering dilakukan auditor independent. Hal ini disebabkan audit laporan keuanngan yang dihasilkan meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan.

Laporan keuangan yang berkualitas adalah salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik. Karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan

⁴ I Gede Pradnya Purnama, I Gusti Ayu Purnamawati dan Nyoman Putra Yasa, dengan judul “Evaluasi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol Kabupaten Buleleng”, Jurnal Akuntansi, (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017, hal. 5.

pemerintah berkualitas yang tercantum didalam PP No.71 tahun 2010, yaitu: Relevan, Laporan keuangan dikatakan relevan apabila keputusan pengguna dipengaruhi oleh informasi yang termuat didalamnya dengan membantu pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi tersebut. Selain itu, informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan memiliki manfaat umpan balik informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Memiliki manfaat prediktif informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. tepat waktu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Andal yaitu: Laporan keuangan andal berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta diverifikasi. Informasi yang andal memiliki karakteristik: Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar

diharapkan untuk disajikan dapat diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Dapat dibandingkan artinya informasi dalam laporan keuangan akan berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi sekarang, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Dapat dipahami artinya Laporan keuangan maksudnya dapat dipahami pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan bataspemahaman para pengguna.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cristy Soputan, Jullie J Sondakh dan Steven Tangkuman yang berjudul “Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara”. Dalam penelitian tersebut kualitas laporan keuangan belum memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang disusun juga tidak sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sudah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan

dan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.⁵

D. Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam Penerapan SAIBA

Dilihat dari aspek sumber daya, suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai.⁶ Sumber daya manusia merupakan aspek penting yang sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi entitas dalam mencapai tujuannya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada salah seorang informan yang merupakan operator SAIBA di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, dilihat bahwasanya dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu memahami sistem karena dalam penyusunan laporan keuangan, sistem yang digunakan saling terintegrasi. Sistem yang saling terintegrasi tersebut mengharuskan setiap aplikasi sinkron satu sama lain. Sehingga sumber daya manusia memang harus mampu memahami prosedur dan alurnya. Salah satu faktor yang memudahkan proses untuk menyusun laporan keuangan melalui SAIBA adalah dengan menempatkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi. Namun juga tidak menutup kemungkinan bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/ekonomi karena hal ini bisa diupayakan dengan mengikuti pelatihan

⁵ Cristy Sopotan, Julie J Sondakh dan Steven Tangkuman, "Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara, hal. 595.

⁶ Edward dalam Eliada Herwiyanti,et.al., "Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan" dalam *Jurnal Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 19, No. 1, Mei 2017, hal.16.

yang diadakan oleh pemerintah ataupun yang diadakan secara internal oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri. Tentu saja juga harus diperkuat dengan kemauan sumber daya manusia dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan yang ada pada Satkernya. Hal ini menunjukkan kemandirian entitas. Asumsi kemandirian entitas disebutkan dalam PP 71 tahun 2010 pada Lampiran I.01 Kerangka Konseptual paragraf 32 bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizki Arvi Yunita, dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaL Sebagai Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang)”. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi SAIBA terdapat kendala yaitu satuan kerja hanya beberapa yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi/ekonomi. Selain itu operator sistem dalam menyusun laporan keuangan masih dijalankan oleh operator yang berbeda, sedangkan sistem yang digunakan merupakan sistem yang saling terintegrasi.⁷ Begitu pula kendala yang terdapat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri,

⁷ Rizki Arvi Yunita, “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaL Sebagai Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan”, Skripsi, 2019, hal. 70-71.

hanya sedikit pegawai yang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi/ekonomi.